

## ABSTRAK

Perkembangan hukum pidana saat ini telah meninggalkan prinsip *societas delinquere non potest* yang merupakan doktrin konvensional dan mengakui pendirian tentang corporate crime dan corporate criminal responsibility. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu diantara banyaknya peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP WvS yang telah mengakomodir korporasi sebagai subjek tindak pidana. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 835/2022/Pid.Sus/PN JKT SEL merupakan variabel yang menggambarkan tentang diskursus dalam pengimplementasian sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Masih terdapatnya kekosongan hukum dalam pengaturan ketentuan dan pedoman pemidanaan korporasi menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam hendak menjatuhkan pidana kepada korporasi, sehingga beban pertanggungjawaban lebih sering diatribusikan kepada anggota dan/ataupengurus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) yang didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier yang ditelusuri melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana dalam konteks kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial Hollywings

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Cybercrime*, Penistaan Agama

## ABSTRACT

*The current development of criminal law has abandoned the principle of societas delinquere non potest which is a conventional doctrine and recognizes the stance on corporate crime and corporate criminal responsibility. Law Number 11 of 2008 jo. Law Number 19 of 2016 jo. Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions is one of the many criminal law laws and regulations outside the WvS Criminal Code which has accommodated corporations as the subject of criminal acts. Case in District Court Decision Number: 835/2022/Pid.Sus/PN JKT SEL is a variable that describes the discourse in implementing the corporate criminal responsibility system. There is still a legal vacuum in the regulation of provisions and guidelines for corporate punishment which is a challenge for law enforcement officials when they want to impose criminal penalties on corporations, so that the burden of responsibility is more often attributed to members and/or management. The research was carried out using normative juridical (doctrinal) research methods which were supported by secondary data in the form of primary, secondary or tertiary legal materials explored through literature study. Based on the research results, it can be seen that corporations can be punished in the context of criminal cases of religious blasphemy committed through Hollywings social media*